

KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN PUSAT PENDIDIKAN TAHUN 2010-2015

Oleh :

Esra Riko Prayogi

Email : ezrarico@ymail.com

Pembimbing : Dra. Hj. Wan Asrida, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H. R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

On the Medium Term Development Plan 2010-2015 Bengkalis regency, set Grand Strategy development of four areas, one of which is the development of regional education centers. In its development until the term of office of Regent of Bengkalis period 2010-2015, a number of programs and activities in realizing Bengkalis as a center of education can not be realized with the maximum. The purpose of the study is to examine the implementation of regional development policy education center and the factors that affect the implementation of the policy of regional development center for education research method is qualitative descriptive research data collection is by interview and documentation. The theory used in this research is the policy and implementation of policies according to Van Meter and Van Horn.

From the results of the field studies showed that some programs and activities in the development of the central area of education is not achieved by maksmimal not even be possible. It can be seen from the projects was State Health Polytechnic and State University who is an excellent program, it was not implemented because of the limited authority, the authority of the organization of Higher Education where it is still in the center. Further Development of High School Boarding School can not be realized with the maximum due to budget constraints and not professional tenders. The factors that affect the implementation of regional development policy education center in Bengkalis based theory of policy implementation, namely: basic measures and policy objectives, policy resources, communication between the organization and implementation of activities, the characteristics of the implementing agencies, conditions-economic, social and political, executive attitudes. In this study the authors concluded that the Education Department has tried to realize the regional development policy education center although in the end there are some problems that cause programs and activities can not be achieved with the maximum. Bengkalis District Government should still continue the programs and activities in the development of the central area of education and must evaluate the programs that can not be done.

Keywords: Policy, Development Education Center Region

Pendahuluan

Setiap orang, sebagai warga negara mempunyai hak yang sama dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Bahkan dengan program wajib belajar, setiap warga negara wajib mengikuti proses pendidikan dan pembelajaran, terutama mereka yang masuk dalam usia sekolah. Pemerintah berkewajiban dalam penyelenggaraan proses pendidikan dan pembelajaran. Ini merupakan amanat yang harus mendapatkan perhatian bagi para pemangku kebijakan, terutama pada aspek pendidikan. Anak-anak dan masyarakat pada umumnya adalah sumber daya manusia yang menjadi tenaga perubahan dan pembangunan bagi bangsa besar ini. Jika mereka tidak mendapatkan perhatian yang seharusnya, mereka dapat menjadi bumerang bagi keberadaan bangsa.

Di Indonesia, hak untuk mendapatkan pendidikan dijamin oleh Konstitusi. Pasal 31 UUD 1945 ayat 1 dengan tegas menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pada ayat 2 menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan dan Pemerintah wajib membiayainya. Lebih lanjut pada ayat 3 menyatakan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang. Pada ayat 4 secara tegas menyatakan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Secara spesifik kerangka acuan sistem pendidikan nasional dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menetapkan bahwa seluruh rakyat Indonesia

berhak atas pendidikan tanpa adanya suatu diskriminasi segala bentuk, serta sekolah gratis sampai tingkat pendidikan dasar. Seperti disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pemerintah Kabupaten/Kota berhak menentukan arah kebijakan pembangunan di bidang pendidikan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2010-2015, sebagai kelanjutan dari RPJMD Kabupaten Bengkalis 2005 – 2010 dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan jangka panjang 2005 – 2025. RPJMD Kabupaten Bengkalis 2010 – 2015, difokuskan pada lima misi yang dielaborasi dengan dua *Grand Strategy*, yaitu *Grand Strategy* Pengembangan Empat Kawasan dan *Grand Statregy* Enam Jaminan. Rincian *Grand Strategy* Pengembangan Empat Kawasan dan *Grand Strategy* Enam Jaminan adalah sebagai berikut:

Empat *Grand Strategy* pengembangan empat kawasan:

1. Kawasan pusat pendidikan dan Agribisnis di pulau Bengkalis;
2. Kawasan pusat industri, pelabuhan dan agroindustri di Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Siak Kecil;
3. Kawasan Pariwisata dan Agribisnis di Pulau Rupat;
4. Kawasan Kota Transit dan Petropolitan di Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir;

Enam *Grand Strategy* Jaminan pada masyarakat:

1. Jaminan berusaha masyarakat dan pengentasan kemiskinan;
2. Jaminan pendidikan, peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru;

3. Jaminan kesehatan dan keluarga sejahtera;
4. Jaminan akses infrastruktur dasar;
5. Jaminan pelayanan publik, pembinaan birokrasi dan kelembagaan daerah;
6. Jaminan pemerataan dan percepatan pembangunan daerah;

Pada poin pertama *Grand Strategy* pengembangan empat kawasan (Kawasan pusat pendidikan dan Agribisnis di pulau Bengkalis) dan poin kedua *Grand Strategy* jaminan pada masyarakat (Jaminan pendidikan, peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru), sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Bengkalis dapat dipahami bahwa pemerintah Kabupaten Bengkalis berupaya untuk meningkatkan pembangunan khususnya di bidang pendidikan.

Upaya yang dilaksanakan untuk merealisasikan Kabupaten Bengkalis sebagai Pusat Pendidikan diantaranya melalui pengembangan sekolah unggulan dan perguruan tinggi yang mengkoordinasikan pendidikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Bupati Bengkalis Herliyan Saleh (2012) dikatakan Pemerintah Kabupaten akan membangun 1 SMA unggulan, 4 SMK unggulan dan 2 pondok pesantren unggulan. Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga akan mendirikan Universitas Sumatera Timur dan pendirian politeknik di beberapa Kecamatan. Berikut ini adalah program yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan Kabupaten Bengkalis Sebagai Pusat Pendidikan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis 2010-2015:

1. Program Perencanaan Sosial Budaya:
 - a. Penyusunan Masterplan Pulau Bengkalis sebagai kawasan Pusat Pendidikan;
 - b. Review Masterplan Pendidikan Kabupaten Bengkalis;

- c. Masterplan Pembangunan SMA/SMK Unggulan di Kabupaten Bengkalis.
2. Program PAUD, Wajib Belajar 9 Tahun dan Pendidikan Menengah:
 - a. Pengembangan Sarana dan Prasarana menuju Sekolah Sehat;
 - b. Pembangunan dan pengembangan SMA dan SMK unggulan;
 - c. Fasilitasi pembangunan dan pengembangan pesantren.
3. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan:
 - a. Fasilitasi pembangunan Universitas;
 - b. Fasilitasi pembangunan Politeknik;
 - c. Optimalisasi Politeknik Bengkalis.

Dalam perkembangannya sampai berakhir masa jabatan Bupati Bengkalis periode 2010-2015, beberapa program dalam mewujudkan Kabupaten Bengkalis sebagai pusat pendidikan tidak dapat terealisasi dengan maksimal, tidak masimal yang dimaksud adalah dalam proses pembangunannya tidak selesai, lebih lanjut program-program lainnya tidak terlaksana, padahal program tersebut merupakan program unggulan yang direncanakan dalam mewujudkan Kabupaten Bengkalis sebagai Pusat Pendidikan. Program-program tersebut diantaranya:

- a. Fasilitasi pembangunan SMA Unggulan (*Boarding School*), sampai saat ini pembangunannya belum selesai;
- b. Fasilitasi Pembangunan Politeknik Kesehatan dan Fasilitasi pembangunan Universitas Sumatera Timur, yang merupakan program unggulan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Bengkalis Sebagai Pusat Pendidikan.

Kebijakan pengembangan Kabupaten Bengkulu sebagai Kawasan Pusat Pendidikan belum mampu menarik minat masyarakat baik itu di Kabupaten Bengkulu maupun masyarakat luar Daerah Kabupaten Bengkulu terutama pada jenjang Pendidikan Tinggi, realita dilapangan menunjukkan masih banyak masyarakat Kabupaten Bengkulu lebih memilih untuk menempuh Pendidikan Tinggi diluar Daerah. Hal ini sangat bertolak belakang dengan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu untuk menarik minat masyarakat agar mau melanjutkan pendidikan, khususnya pada jenjang Perguruan Tinggi di Pulau Bengkulu.

Identifikasi masalah dalam penelitian ini: Ketidakjelasan standar dan indikator yang hendak dicapai, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya standar dan indikator pencapaian program-program yang akan dilaksanakan didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu 2010-2015. Keterbatasan sumber daya dalam mendukung pelaksanaan program-program Kebijakan Pengembangan Kawasan Pusat Pendidikan, hal ini berkaitan dengan sumber daya manusia, anggaran, dan ketersediaan waktu dalam pelaksanaan program-program. Keterbatasan kewenangan, khususnya pada pelaksanaan pembangunan pendidikan tinggi. Kewenangan masih berada dipusat, hal ini mengakibatkan kurang maksimalnya pelaksanaan program-program yang telah direncanakan.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi terkait dengan Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan kawasan Pusat Pendidikan maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian yang diberi judul: **“KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN PUSAT PENDIDIKAN TAHUN 2010-2015.”**

Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas maka penulis merumuskan masalah yakni :

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan pengembangan kawasan pusat pendidikan di Kabupaten Bengkulu tahun 2010-2015?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pengembangan kawasan pusat pendidikan di Kabupaten Bengkulu tahun 2010-2015?

Kerangka Teori

a. Kebijakan Publik

Pada dasarnya terdapat banyak batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan publik (*public policy*) dalam literatur ilmu politik. Masing-masing definisi tersebut memberi penekanan yang berbeda-beda. Perbedaan ini timbul karena masing-masing ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Sementara disisi yang lain, pendekatan dan model yang digunakan para ahli pada akhirnya juga akan menentukan bagaimana kebijakan publik tersebut hendak didefinisikan.

Carl F. Friederick mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang di usulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, di mana kebijakan yang diusulkan tersebut di tujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Definisi yang ia berikan menyangkut dimensi yang luas karena kebijakan tidak hanya dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh kelompok maupun individu.

Menurut Miriam Budiardjo, kebijakan (*policy*) adalah suatu kumpulan yang di ambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan

cara untuk mencapai tujuan itu, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Para sarjana menekankan aspek kebijakan umum (*Public Policy, Beleid*), menganggap bahwa setiap masyarakat mempunyai tujuan bersama. Cita-cita bersama ini ingin dicapai melalui usaha bersama, dan untuk itu perlu di tentukan rencana-rencana yang mengikat, yang dituang dalam kebijakan (*policies*) oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini Pemerintah.

Berhubungan dengan kebijakan publik ada beberapa komponen yang memiliki tingkatan, Nugroho menegaskan bahwa secara sederhana rentetan atau tingkatan kebijakan publik di Indonesia dapat di kelompokkan menjadi tiga, yakni:

1. Kebijakan publik yang bersifat makro (umum) yaitu UUD 1945, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah.
2. Kebijakan publik yang bersifat meso (menengah) yaitu Peraturan Menteri, Surat Ederan Menteri, Peya.raturan Gubernur, Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota.
3. Kebijakan publik yang bersifat mikro yang mengatur pelaksanaan dari kebijakan di atasnya.

Kebijakan Publik bukan hanya sebatas dokumen resmi, seperti Perundang-Undangan dan Peraturan Pemerintah (pusat dan daerah), tetapi mempunyai pengertian yang lebih luas lagi, yaitu sebagai pedoman, acuan, strategi, dan kerangka tindakan yang di pilih atau di tetapkan oleh pemerintah sebagai garis besar yang digunakan dalam melakukan kegiatan pembangunan.

b. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak

atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (*output*) maupun sebagai hasil.

Realitasnya, di dalam implementasi itu sendiri terkandung suatu proses yang kompleks dan panjang. Proses implementasi sendiri bermula sejak kebijakan ditetapkan atau memiliki payung hukum yang syah. Setelah itu tahapan-tahapan implementasi akan dimulai dengan serangkaian kegiatan mengelola peraturan: membentuk organisasi, mengarahkan orang, sumberdaya, teknologi, menetapkan prosedur, dan seterusnya dengan tujuan agar tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dapat diwujudkan.

Implementasi adalah apa yan terjadi setelah peraturan Perundang-Undangan ditetapkan, yang memberikan otoritas pada suatu program, kebijakan, manfaat atau suatu bentuk hasil (*Output*) yang jelas. Implementasi kebijakan dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan Undang-Undang dimana sebagai aktor, organisasi prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program

Abdul Wahab mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang di atasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan

berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya.

Implementasi kebijakan publik sebagai salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik, sering bertentangan dengan yang diharapkan, bahkan menjadikan produk kebijakan itu sebagai menjadi batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri. Itulah sebabnya implementasi kebijakan publik, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang studi kebijakan publik, yang menurut Djadja Saefullah bahwa studi kebijakan publik tersebut dapat dipahami dari dua perspektif, yakni:

Pertama, perspektif politik, bahwa kebijakan publik di dalamnya perumusan, implementasi, maupun evaluasinya pada hakikatnya merupakan pertarungan berbagai kepentingan publik di dalam mengalokasikan dan mengelola sumber daya (*resources*) sesuai dengan visi, harapan dan prioritas yang ingin diwujudkan. Kedua, perspektif administrative, bahwa kebijakan publik merupakan ikhwal berkaitan dengan system, prosedur, dan mekanisme, serta kemampuan para pejabat publik (*official officers*) di dalam menterjemahkan dan menerapkan kebijakan publik, sehingga visi dan harapan yang diinginkan dicapai dapat diwujudkan di dalam realitas.

Van Meter dan Van Horn membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Yang perlu ditekankan disini adalah bahwa tahap

implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah Undang-Undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Model proses implementasi yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn tidak dimaksudkan untuk mengukur dan menjelaskan hasil-hasil akhir dari kebijakan pemerintah, tetapi untuk mengukur dan menjelaskan tentang pencapaian-pencapaian program. Perlu diperhatikan bahwa beberapa pelayanan dapat diberikan tanpa mempunyai dampak substansial pada masalah yang diperkirakan berhubungan dengan kebijakan. Suatu kebijakan mungkin diimplementasikan secara efektif, tetapi gagal memperoleh dampak substansial karena kebijakan tidak disusun dengan baik atau karena keadaan-keadaan lainnya. Oleh karena itu, pelaksanaan program yang berhasil mungkin merupakan kondisi yang diperlukan sekalipun tidak cukup bagi pencapaian hasil akhir secara positif.

Model implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn menetapkan beberapa variabel yang diyakini dapat mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan. Beberapa variabel yang terdapat dalam model Meter dan Horn adalah sebagai berikut:

1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, adalah apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, jangka pendek, menengah atau panjang. Kejelasan dan sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik sehingga di akhir program dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan atau program yang dijalankan.
2. Sumber-sumber kebijakan, menunjuk kepada seberapa besar dukungan

finansial dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan. Hal sulit yang terjadi adalah berapa nilai sumber daya (baik finansial maupun manusia) untuk menghasilkan implementasi kebijakan dengan kinerja baik, evaluasi program/kebijakan seharusnya dapat menjelaskan nilai yang efisien.

3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, menunjuk kepada mekanisme prosedur yang dicanangkan untuk mencapai sasaran dan tujuan program. Komunikasi ini harus ditetapkan sebagai acuan. Komunikasi antar lembaga juga menunjuk adanya tuntutan saling dukung antar institusi yang berkaitan dengan program/kebijakan.
4. Karakteristik badan-badan pelaksana, menunjuk seberapa besar daya dukung struktur organisasi, nilai-nilai yang berkembang, hubungan dan komunikasi yang terjadi di internal birokrasi.
5. Kondisi ekonomi, sosial dan politik, menunjuk bahwa lingkungan dalam ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan itu sendiri.
6. Kecenderungan pelaksana, berkaitan dengan sikap dari pelaksana kebijakan. Seberapa demokratis, antusias dan responsive terhadap kelompok sasaran dan lingkungan yang dapat ditunjuk sebagai bagian dari sikap pelaksana ini.

Apapun produk kebijakan itu, pada akhirnya bermuara pada tataran mengimplementasikan kebijakan tersebut. Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh banyak faktor, dan masing-masing faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang

menjelaskan data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan Dokumentasi. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer yang di peroleh dari lokasi penelitian berupa informan penelitian dan selanjutnya di dukung oleh data sekunder. Data Sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia. Data sekunder digunakan untuk mendukung analisis masalah yang diteliti yang terdiri dari buku, jurnal, Peraturan Perundang-Undangan, dan sumber-sumber terkait lainnya.

Pembahasan

A. Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kawasan Pusat Pendidikan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2010-2015

Model proses implementasi yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn tidak dimaksudkan untuk mengukur dan menjelaskan hasil-hasil akhir dari kebijakan pemerintah, tetapi untuk mengukur dan menjelaskan tentang pencapaian-pencapaian program. Perlu diperhatikan bahwa beberapa pelayanan dapat diberikan tanpa mempunyai dampak substansial pada masalah yang diperkirakan berhubungan dengan kebijakan. Suatu kebijakan mungkin diimplementasikan secara efektif, tetapi gagal memperoleh dampak substansial karena kebijakan tidak disusun dengan baik atau karena keadaan-keadaan lainnya. Oleh karena itu, pelaksanaan program yang berhasil mungkin merupakan kondisi yang diperlukan sekalipun tidak cukup bagi pencapaian hasil akhir secara positif.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van bahwa kebijakan dapat dilaksanakan jika sudah ada aturan Perundang-Undangan, maka didalam pelaksanaan Kebijakan Pengembangan

Kawasan Pusat Pendidikan di Kabupaten Bengkalis, mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis tahun 2010-2015. Bupati Bengkalis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010-2015 telah menetapkan pengembangan empat kawasan, salah satu diantaranya adalah Pengembangan Kawasan Pusat Pendidikan dan Agribisnis di Pulau Bengkalis. Pusat pendidikan diartikan satu status yang akan menjadi pengakuan sebagai contoh pendidikan yang memiliki khas dan diminati oleh semua pihak dalam memperoleh ilmu pengetahuan.

Untuk mewujudkan Kabupaten Bengkalis Sebagai Pusat Pendidikan, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan. Rangkaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan Kabupaten Bengkalis Sebagai Pusat Pendidikan merupakan perjalanan panjang dan tidak mudah. Berikut ini adalah kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mewujudkan Kabupaten Bengkalis Sebagai Pusat Pendidikan tahun 2010-2015:

1. Persiapan-persiapan mengangkat isu Pulau Bengkalis Sebagai Pusat Pendidikan (2011)

Pada tahap awal pelaksanaan Kebijakan dimulai dengan kegiatan mengangkat isu Pulau Bengkalis sebagai Pusat Pendidikan melalui seminar, rakor, lokakarya dan diskusi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis. kegiatan ini dilakukan sebagai langkah awal untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dijalankan.

2. Penyiapan Sejumlah Dokumen Perencanaan

Dinas Pendidikan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis juga menyiapkan dokumen-dokumen perencanaan. Dokumen-dokumen perencanaan yang telah

dipersiapkan merupakan dasar pelaksanaan program dan kegiatan selanjutnya dalam mewujudkan Kabupaten Bengkalis Sebagai Pusat Pendidikan.

Lebih lanjut berkaitan dengan dokumen perencanaan, Dinas Pendidikan juga telah menyiapkan dokumen untuk pembangunan SMA/SMK Unggulan serta dokumen perencanaan pembanguna Pendidikan Tinggi yang ada di Kabupaten Bengkalis, adapun dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dokumen perencanaan fasilitasi awal pendirian Universitas Negeri di Pulau Bengkalis, sebagai syarat pengajuan ke Kementerian Pendidikan Nasional (2012);
- b. Dokumen perencanaan fasilitasi awal pembangunan politeknik/akademi negeri di Kabupaten Bengkalis (2012);
- c. Dokumen perencanaan lengkap untuk 1 SMA Unggulan dan 6 SMK Unggulan di Kabupaten Bengkalis (2012);

3. Pembangunan Sekolah Unggulan (2013-2014)

Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kawasan Pusat Pendidikan mulai dilaksanakan pada tahun 2011. Pada saat dimulainya pelaksanaan Kebijakan, sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Bengkalis kurang mendukung. Akibatnya sebelum menjalankan program-program Pengembangan Kawasan Pusat Pendidikan, harus dilaksanakan pembenahan terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Kabupaten Bengkalis.

Salah satu Kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan Kabupaten Bengkalis Sebagai Pusat Pendidikan adalah pengembangan sekolah unggulan mulai dari tingkat SD, SMP sampai dengan tingkat SMA dan SMK. Pengembangan Sekolah Unggulan ini dilaksanakan dengan memilih

sekolah-sekolah di Pulau Bengkalis yang memenuhi persyaratan, salah satu yang menjadi syaratnya adalah luas lahannya diatas 1 hektar.

Untuk persyaratan lainnya seperti sarana dan prasarana, jika masih terdapat kekurangan maka dilakukan pembenahan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencapai persyaratan minimal agar sekolah tersebut bisa dijadikan sekolah unggulan.

a. SD dan SMP Unggulan

Tidak semua sekolah dijadikan sekolah Unggulan, namun hanya sekolah yang memenuhi persyaratan saja yang mendapat kesempatan untuk menjadi Sekolah Unggulan. Untuk tingkat SD dan SMP ada 2 sekolah yang telah dijadikan Sekolah Unggulan yaitu: Sekolah Dasar Negeri 48 Kecamatan Bengkalis dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kecamatan Bengkalis.

b. Pembangunan SMA *Boarding School* (2014)

Untuk tingkat SMA juga telah dibangun SMA *Boarding School* yang merupakan SMA Unggulan Daerah di Kabupaten Bengkalis, namun yang menjadi permasalahan pembangunan SMA *Boarding School* tidak selesai sampai berakhirnya pemerintahan periode 2010-2015. Terkendalanya Pembangunan disebabkan oleh faktor anggaran. Hal lain yang menjadi penyebab adalah kekacauan pada tender dan tidak profesionalnya kontraktor yang mengambil tender proyek tersebut. Hal ini seharusnya mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah, bukan hanya pada pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kawasan Pusat Pendidikan, namun untuk kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya. Pemerintah harus lebih bijak menyeleksi kontraktor-kontraktor yang akan mengambil tender. Proyek-proyek yang akan dilaksanakan hendaknya dilakukan oleh orang-orang yang berkualitas dan

profesional. sehingga tidak terjadi kekacauan dalam pelaksanaannya.

c. Pembangunan SMK Unggulan (2013-2014)

Pemerintah Daerah menginginkan *output* dari pendidikan itu tidak menjadi beban bagi pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu juga dilaksanakan pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Unggulan, meskipun SMK itu tidak semuanya berada dipulau Bengkalis namun itu menjadi bagian yang penting didalam rangkaian pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kawasan Pusat Pendidikan. Adapun SMK Unggulan yang telah dibangun adalah sebagai berikut: SMKN 2 Pariwisata Rupert Utara (2013), pada tahun 2014 sudah menerima angkatan pertamanya; SMKN 1 Kehutanan Rupert Utara (2013), pada tahun 2015 memasuki dua tahun operasional; SMKN 1 Pertanian Bantan (2013), pada tahun 2014 sudah menerima angkatan pertamanya; SMKN 2 Penerbangan Bukit Batu (2013), pada tahun 2015 sudah menerima siswa angkatan pertama; SMKN 3 Perikanan Bengkalis (2014); SMKN 3 Perminyakan Mandau (2014).

d. Fasilitas Pembanguna Pesantren Modern (2013)

Dalam memajukan dunia pendidikan terlebih pendidikan bidang agama, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis juga telah mengembangkan Pondok Pesantren Unggulan. Hal ini merupakan rangkaian dari kegiatan Kebijakan Pengembangan Kawasan Pusat Pendidikan. Dengan adanya pembangunan Pesantren Modern diharapkan mampu untuk menciptakan generasi Islami sebagai calon pemimpin bangsa.

Adapun Pondok Pesantren yang dikembangkan yaitu Pondok Pesantren Nurul Hidayah. Untuk mendukung Pondok Pesantren Nurul Hidayah sebagai salah satu lembaga pendidikan Unggulan, pada tahun

2013 Pemerintah Kabupaten Bengkalis membantu sarana dan prasarana pendukung. Bantuan tersebut berupa pembangunan gedung 6 lokal ruang belajar mengajar, 1 unit gedung serbaguna, 1 unit galeri seni dan 1 unit gedung multimedia.

4. Fasilitasi Pembangunan Pendidikan Tinggi (2012-2013)

Untuk mendukung Pengembangan Kawasan Pusat Pendidikan di Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan berusaha meningkatkan pembangunan pada tingkat perguruan tinggi. Langkah yang diambil oleh Pemerintah Daerah Bengkalis adalah menerbitkan beberapa perguruan tinggi yang telah ada di Kabupaten Bengkalis. ada pun perguruan tinggi yang dinegerikan yaitu: Politeknik Bengkalis, yang dimana selama 13 tahun berdiri masih berstatus yayasan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) AL-Kautsar, yang merupakan Sekolah tinggi yang bernaung dibawah yayasan AL-Kautsar. Lebih lanjut ditingkat pendidikan tinggi pada tahun 2012 Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis telah membangun Akademi Komunitas Negeri yang pada tahun 2013 sudah mulai melaksanakan perkuliahan. Selanjutnya di tahun 2013 Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis juga telah membangun Politeknik Maritim Negeri yang merupakan politeknik maritim satu-satunya di Sumatera.

Dalam perjalanannya beberapa kegiatan pembangunan ditingkat Pendidikan Tinggi tidak terlaksana, padahal pembangunan ditingkat Pendidikan Tinggi merupakan sektor unggulan yang ditawarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis untuk menarik minat masyarakat agar melanjutkan Pendidikan Tinggi di Kabupaten Bengkalis. Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Pendidikan telah berusaha untuk

merealisasikan program yang telah direncanakan, namun dalam prosesnya mendapat beberapa kendala. ada pun Pembangunan Pendidikan Tinggi yang tidak terlaksana yaitu:

- a. Fasilitasi Pembangunan Politeknik Kesehatan Negeri Bengkalis
- b. Fasilitasi Pembangunan Universitas Negeri

5. Sosialisasi dan Publikasi Pulau Bengkalis Sebagai Pusat Pendidikan (2012-2015)

Untuk memberikan informasi sekaligus sebagai sarana promosi Kabupaten Bengkalis sebagai Pusat Pendidikan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis terus berusaha dengan mensosialisasikan dan mempublikasikan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Hal tersebut dapat dilihat dari rentang tahun 2012 sampai dengan 2012, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan rutin yakni sosialisasi dan publikasi Pulau Bengkalis Sebagai Pusat Pendidikan. Sosialisasi dilakukan dengan tujuan agar masyarakat mengetahui program dan kegiatan yang ditawarkan, dengan harapan masyarakat bisa tertarik untuk menempuh pendidikan di Kabupaten Bengkalis, khususnya pada tingkat Pendidikan Tinggi.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Pusat Pendidikan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2010-2015

Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kabupaten Bengkalis Sebagai Pusat Pendidikan masih belum tercapai dengan maksimal, meskipun Pemerintah Daerah Bengkalis melalui Dinas Pendidikan telah berusaha merealisasikan program-program yang telah direncanakan, masih terdapat kendala-kendala yang mempengaruhi pelaksanaan dari kebijakan tersebut, berikut

ini hasil penelitian dan pembahasan yang dilaksanakan penulis dilapangan, merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn:

a. Ukuran-Ukuran Dasar dan Tujuan-Tujuan Kebijakan

Kebijakan Pengembangan Kawasan Pusat Pendidikan Tahun 2010-2015 didalam pelaksanaannya tidak memiliki ukuran-ukuran dasar yang jelas, tidak jelasnya sasaran serta indikator yang ingin dicapai. Hal ini mengakibatkan terjadi kekaburan dalam upaya pencapaian kebijakan yang telah ditetapkan. Berdasarkan RPJMD (Rencana Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Bengkalis Tahun 2010-2015, didalamnya hanya memuat program-program yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Kabupaten Bengkalis Sebagai Pusat Pendidikan. Program-program tersebut tidak disertai dengan ukuran-ukuran dasar (standar), sasaran serta indikator-indikator yang jelas.

Dinas Pendidikan sebagai lembaga teknis yang merupakan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam pelaksana Kebijakan Pengembangan Kawasan Pusat Pendidikan menjalankan kebijakan tersebut tanpa memiliki pedoman standar, sasaran dan indikator-indikator yang jelas. Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis sebagai SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang melaksanakan pembangunan di bidang Pendidikan, dalam hal ini juga wajib memiliki RENSTRA (Rencana Strategis) terkait dengan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun (2010-2015). Namun fakta yang ditemukan peneliti dilapangan, Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis tidak memiliki dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud. Sebagai arah dalam melaksanakan Pembangunan dibidang pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis hanya berpedoman pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah) Kabupaten Bengkalis tahun 2010-2015.

Meskipun tidak ada kejelasan mengenai ukuran-ukuran dasar, sasaran-sasaran yang ingin dicapai serta indikator-indikator pencapaian program, Kebijakan Pengembangan Kawasan Pusat Pendidikan di Kabupaten Bengkalis tetap dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Hal tersebut mengakibatkan kekaburan dalam mengukur kinerja pencapaian program dan kegiatan.

b. Sumber-Sumber Kebijakan

Disamping ukuran-ukuran dasar dan sasaran kebijakan, yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber-sumber yang tersedia. Sumber-sumber layak mendapat perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan suatu kebijakan, jika personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif.

Manusia merupakan salah satu sumber daya dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Peran sumber daya manusia itu sendiri sebagai salah satu unsur pendukung berjalannya organisasi. Sumber daya manusia yang memadai secara kualitas dan kuantitas yang tepat sesuai dengan kompetensi yang dimiliki juga keharusan bagi suatu organisasi pemerintahan. Adapun riwayat pendidikan pegawai di Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis sebagai berikut: SD (1 orang), SMP (5 orang), SMA (55 orang), Diploma (6 orang), Sarjana (30

orang), Pasca Sarjana (7 orang). Berdasarkan data tersebut kualitas pendidikan yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis belum cukup memadai. Sekitar 50% dari jumlah pegawai hanya tamatan SMA.

Diluar dari sumber daya manusia, sumber daya lain juga perlu diperhitungkan adalah anggaran dan waktu. Ketersediaan anggaran sangat menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Program-program yang direncanakan tidak akan terwujud tanpa ditopang dengan anggaran yang memadai. Anggaran untuk bidang pendidikan di Kabupaten Bengkalis telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yakni 20% dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Bengkalis. Anggaran untuk bidang pendidikan di Kabupaten Bengkalis cukup besar, rata-rata setiap tahunnya mencapai 900 Miliar Rupiah, sekitar 700 Milyar Rupiah digunakan untuk membiayai gaji guru serta untuk operasional, dan selebihnya sekitar 200 Milyar Rupiah digunakan untuk kebutuhan bidang pendidikan yang lain.

Pada beberapa kasus waktu yang singkat dalam pelaksanaan kebijakan juga mempengaruhi implementasi suatu kebijakan. Kebijakan yg kompleks sementara rentang waktu untuk merealisasikan program terbatas, sehingga program-program tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Hal ini juga merupakan salah faktor yang menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan program-program yang telah direncanakan dalam Kebijakan Pengembangan Kawasan Pusat Pendidikan.

c. Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan

Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis melaksanakan komunikasi dengan organisasi internal dan organisasi eksternal. Organisasi Internal adalah struktur

organisasi di Dinas Pendidikan itu sendiri, sedangkan organisasi eksternal dalam hal ini yaitu instansi-instansi lain serta *stake holder* yang mendukung pelaksanaan program-program Pengembangan Kawasan Pusat Pendidikan. Komunikasi yang dilaksanakan diorganisasi internal Dinas Pendidikan dilakukan dengan koordinasi dan rapat-rapat formal.

Komunikasi yang terjalin diinternal organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis berjalan cukup baik. Komunikasi dilaksanakan melalui koordinasi, baik dalam rapat formal maupun koordinasi-koordinasi informal antar bidang dan lintas bidang yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.

Sementara koordinasi yang dilakukan dengan instansi diluar Dinas Pendidikan kurang berjalan dengan baik. Hal itu dapat dilihat kurang bersinerginya instansi lain dengan Dinas Pendidikan, yang dimana instansi terkait masih berjalan sendiri-sendiri. Lebih lanjut dukungan yang diberikan instansi-instansi terkait dalam menjalankan program-program juga belum maksimal.

d. Karakteristik Badan Pelaksana

Karakteristik dari agen pelaksana akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program dalam mewujudkan Kabupaten Bengkalis Sebagai Pusat Pendidikan, Dinas Pendidikan merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan program-program yang telah direncanakan. Dalam menjalankan program tersebut setiap bidang bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang.

Meskipun setiap bidang bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, namun pekerjaan yang sangat banyak dan kompleks yang harus diselesaikan oleh para aparatur birokrasi di Dinas Pendidikan, mengakibatkan program-program tidak bisa berjalan dengan

maksimal. Lebih lanjut struktur birokrasi di Dinas Pendidikan masih banyak diisi oleh staf-staf yang kurang profesional, dapat dilihat bahwa hampir setengah dari jumlah pegawai yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis diisi oleh pegawai yang hanya lulusan SMA. Ditambah lagi karakteristik birokrasi di Kabupaten Bengkalis secara umum dan Dinas Pendidikan secara khusus masih sangat kental dengan nuansa patrimonial.

e. Kondisi-Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Dari lingkungan sosial dapat dilihat bahwa masyarakat mendukung dalam pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kawasan Pusat Pendidikan, namun didalam prosesnya terdapat keraguan ditengah masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan, hal itu dikarenakan besarnya tujuan yang hendak dicapai. Lebih lanjut lagi walaupun beberapa program-program Pengembangan Kawasan Pusat Pendidikan telah terlaksana khususnya pada tingkat pendidikan tinggi, namun penulis melihat realita yang terjadi bahwa masyarakat masih banyak yang lebih memilih menempuh pendidikan diluar Daerah Kabupaten Bengkalis.

Kemudian lingkungan ekonomi juga sangat mempengaruhi seberapa berjalannya kebijakan tersebut dilaksanakan. Dalam hal ini menyangkut tentang anggaran. Setiap program yang dibuat tentunya membutuhkan sumber dana yang cukup dan memadai agar program yang telah direncanakan tersebut dapat berjalan secara maksimal. Anggaran untuk pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kawasan Pusat Pendidikan kurang mendukung, hal itu dikarenakan anggaran banyak digunakan untuk kebutuhan yang memang sudah ada seperti gaji guru, operasional dan lain-lain.

Selain itu, lingkungan politik juga mempengaruhi berjalannya suatu kebijakan. Mendukung atau tidaknya terhadap kebijakan tersebut. Lingkungan politik

dalam hal ini yaitu semua instansi yang terkait dalam Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kawasan Pusat Pendidikan. Semua instansi yang terkait dalam pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kawasan Pusat Pendidikan tersebut mendukung terhadap program-program yang telah direncanakan namun belum maksimal.

f. Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana merupakan faktor penting dalam pendekatan mengenai studi implementasi kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan diharapkan berlangsung efektif, para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Kebanyakan para pelaksana menggunakan sedapat mungkin otoritas dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Salah satu alasan mengenai hal ini disebabkan independensi mereka terhadap pembuat kebijakan. Alasan yang lain adalah kompleksitas dari kebijakan itu sendiri.

Sikap dari pelaksana sendiri yang akan mempengaruhi cara pandang mereka terhadap suatu kebijakan. Kecenderungan sikap pelaksana dalam menjalankan suatu kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah merupakan salah satu penyebab kurang berjalannya suatu kebijakan. Program-program yang telah dibuat terkendala dari sikap para pelaksana pembuat program tersebut. Kurang komitmennya dalam menjalankan program tersebut sehingga program tersebut kurang berjalan secara maksimal.

Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis selaku Pelaksana Kebijakan, telah berkomitmen dan berusaha untuk merealisasikan program-program yang telah direncanakan. Dalam perjalanannya masih banyak kekurangan dan kendala yang

dihadapi. Namun itu semua tidak menjadi penghalang untuk tetap terus meningkatkan pembangunan dibidang pendidikan sebagaimana cita-cita para leluhur kita yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

Penutup

A. Kesimpulan

1. Dinas Pendidikan telah berusaha untuk merealisasikan program dan kegiatan Pengembangan Kawasan Pusat Pendidikan. Adapun kegiatan yang telah terlaksana yaitu: menyiapkan dokumen perencanaan, pembangunan sekolah unggulan, fasilitasi pembangunan pendidikan tinggi dan sosialisasi program dan kegiatan Pengembangan Kawasan Pusat Pendidikan. Namun dalam perjalanannya tidak semua program bisa terlaksana dengan maksimal. Hal tersebut dikarenakan kendala-kendala yang ditemui dalam proses pelaksanaan, kendala tersebut diantaranya: keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah khususnya pada penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, selanjutnya ketidakjelasan dan tidak profesionalnya kontraktor yang mengambil tender pelaksanaan proyek, hal ini mengakibatkan tidak selesainya pembangunan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan yaitu: tidak terdapat standar dan indikator yang jelas dalam pencapaian program, hal ini mengakibatkan terjadi kekaburan dalam mengukur pencapaian dari program-program tersebut. Dalam pelaksanaannya juga tidak didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Anggaran pelaksanaan program masih bergantung pada anggaran pendidikan Kabupaten

Bengkalis, sementara kebutuhan anggaran dalam bidang pendidikan sangat besar tidak terfokus untuk membiayai pelaksanaan kebijakan tersebut. Waktu yang terbatas dalam merealisasikan program-program menyebabkan tidak maksimalnya pencapaian program tersebut. komunikasi antar badan pelaksana juga sangat menentukan seberapa berjalannya komunikasi dan kerjasama antar instansi dalam menjalankan program-program yang telah dibuat oleh masing-masing instansi.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis hendaknya tetap melanjutkan program dan kegiatan yang belum tercapai. Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Pusat Pendidikan hendaknya dilakukan secara berkelanjutan. Karena Berdasarkan fakta dan analisis penulis pembangunan dibidang pendidikan itu tidak bisa serta merta dilakukan dalam jangka waktu yang singkat,, harus ada kesinambungan didalam pelaksanaannya.
2. Pemerintah Daerah juga harus melakukan evaluasi terhadap program-program yang belum bisa terlaksana sehingga bisa diketahui permasalahan yang terjadi dilapangan mengenai kendala-kendala yang menyebabkan program-program dalam Pengembangan Kawasan Pusat Pendidikan itu tidak bisa terlaksana dengan maksimal. Kedepannya diharapkan dengan adanya evaluasi, kendala-kendala didalam pelaksanaan program-program bisa diatasi dan pelaksanaan kebijakan dapat tercapai dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bagong, Suyanto. 2005. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Kencana: Jakarta.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Polici Analisis*. Yogyakarta: Gava Media.
- M.M, Marzuki. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisa Data*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Moleong, J. Lexi. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Rumidi, Sukandar. 2004. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: UGM Press.
- Saroni, Mohamad. 2003. *Pendidikan Untuk Orang Miskin: Membuka Keran Keadilan Dalam Kesempatan Berpendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Praktik (Studi Implementasi Pembangunan Perkebunan Daerah Transmigrasi Riau)*. Pekanbaru: Alfa Riau.
- Syafiie, Kencana Inu. 1998. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT. Pertja.
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2000. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Media Pressindo.
- Jurnal:
Dayu Lestari dan Hendra Saputra. *Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Aksesibilitas Pendidikan di Indonesia Periode Sebelum dan Setelah Desentralisasi Fiskal*. Jurnal BPPK Volume 7 Nomor 1, 2014.
- Zarmaili. *Peran Pemerintah Daerah Terhadap Sektor Pendidikan di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi*. Jurnal Bina Praja Vol. 5 No. 1 Maret 2013.
- E-book:
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional 2013, *Masyarakat adat di Indonesia: menuju perlindungan yang inklusif*.
- Skripsi:
Jumaidi Husin Irkami. 2014. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Desa Tertinggal di Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis*, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Riau.
- Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2010-2015.